



KR-Surya Adi Lesmana

OBJEK WISATA ALTERNATIF: Pengunjung berfoto di bangunan bersejarah Kompleks Makam Panembahan Senopati Kotagede Yogya, Selasa (30/6). Kota-gede menjadi salah satu tujuan alternatif wisatawan untuk bertamasya, karena saat ini masih banyak objek wisata yang kembali tertunda pembukaannya.

TEGURAN KERAS JOKOWI KE KABINET Pemerintah Harus Lakukan Langkah Nyata

YOGYA (KR) - Teguran keras Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinetnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, menjadi perhatian publik. Menurut Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM, Dr Wawan Mas'udi, sidang kabinet yang digelar pada 18 Juni 2020 lalu itu awalnya tertutup, namun kemudian dibuka ke publik beberapa hari ini, sehingga ada jeda antara sidang tersebut dengan waktu dipublikasikan.

Menurut Wawan, hal ini memberikan pesan. Pertama, Presiden awalnya ingin memberikan arahan tertutup agar para menteri mengambil langkah-langkah extraordinary untuk mengatasi situasi krisis sekarang ini. Tapi nampaknya instruksi yang sudah dua minggu dilontarkan itu dinilai Presiden tidak cukup dilakukan oleh para menternya. "Jokowi sepertinya ingin menyampaikan ke publik, bahwa sebagai Presiden dirinya sudah melakukan sesuatu atau memberi instruksi tapi belum dilakukan oleh para menteri," terang Wawan kepada KR, Selasa (30/6).

Dijelaskan Wawan, jika dilihat dari kaca-mata komunikasi publik, sikap tegas

Presiden dalam sidang kabinet yang dibuka ke publik itu bagus, bahwa Presiden serius menyuruh menternya. Tapi hal itu bisa dibaca dengan cara lain, bahwa ada sistem koordinasi di dalam kabinet yang tidak berjalan. Karena instruksi Presiden yang begitu eksplisit, ternyata tidak ditanggapi atau dipahami oleh para menteri.

Sehingga muncul pertanyaan, apakah para menteri memang tidak kompeten dan tidak bisa menangkap maunya Presiden, atau ada problem fragmented government atau pemerintahan yang bersifat tercerai-berai, sehingga instruksi Presiden tidak bisa secara langsung dilaksanakan oleh para menteri. "Ini mengindikasikan ada persoalan dalam kabinet," ujar Wawan.

Menurut Wawan, atas persoalan tersebut, Presiden harus melakukan langkah-langkah serius, tidak cukup hanya dengan menyampaikan ke publik, bahwa dirinya sudah menyuruh para menternya melakukan sesuatu. "Kalau memang ada menteri yang tidak sanggup bekerja, Presiden ya seharusnya lakukan sesuatu lah, lakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap kinerja menteri, toh Presiden yang punya menteri," katanya. (Dev)-d

TATANAN NORMAL BARU SEKTOR WISATA Didorong Lakukan Penyesuaian Pelayanan

JAKARTA (KR) - Pemulihan sektor pariwisata terus didorong dalam tatanan normal baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Pembina Pelayanan Publik Nasional, turut berpartisipasi agar pelayanan sektor pariwisata menjadi lebih baik, sehingga mendapatkan kepercayaan lagi dari para wisatawan melalui penerapan berbagai kebijakan pelayanan publik.

"Saat ini kami fokus pada identifikasi berbagai permasalahan, tantangan serta bagaimana strategi yang telah dilakukan dalam mengelola pariwisata pada pandemi Covid-19," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyesuaian Pelayanan Pariwisata di Era Tatanan Normal Baru secara virtual, Selasa (30/6). Dikatakan, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi merupakan salah satu dari empat fokus utama dalam tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Diah menjelaskan, sektor pariwisata sa-

ngat bergantung pada kepercayaan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya strategis agar destinasi wisata semakin diminati meskipun di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Saat ini sektor pariwisata mengalami *lack of trust destination* karena dampak pandemi Covid-19 melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah yang membatasi perjalanan. Wisatawan juga masih merasa nyaman untuk tetap berada di rumah dari pada pergi berwisata demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ungkap Diah.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yuriyanto mengatakan, sampai Selasa (30/6), jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional bertambah 1.293 orang, sementara yang sembuh bertambah 1.006 orang. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus positif secara kumulatif menjadi 56.385 orang dan yang sembuh menjadi 24.806 orang. Kasus meninggal dunia bertambah 71, sehingga total menjadi 2.876 kasus. (Ati)-f

UNY GELAR DISKUSI PEMIMPIN DAN BEM Utamakan Transparansi Penggunaan Dana UKT

SLEMAN (KR) - Sebagai bentuk transparansi, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggelar dialog pimpinan UNY dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNY, Senin (29/6). Dalam diskusi tersebut, ada hal yang menjadi sorotan, beberapa di antaranya tentang transparansi penggunaan dana Uang Kuliah Tunggal (UKT), jaminan keamanan akademik bagi mahasiswa yang KKN di masyarakat, subsidi bagi mahasiswa KKN, bantuan kuota untuk pembelajaran daring dan SOP pembelajaran daring.

"Universitas telah memiliki Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT) berdasarkan rencana strategis (renstra) UNY. Laporan penggunaan UKT secara lengkap diberikan di akhir tahun anggaran, disusun per tahun sesuai sistem anggaran UNY sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangannya juga diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akuntan publik," kata Rektor UNY, Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd dalam keterangan resmi yang diterima KR, Selasa (30/6).

Ia mengatakan, ada perbedaan antara RKPT dengan realisasi penggunaan dana tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, belum bisa diprediksi apakah perbedaan itu menjadi minus atau plus. "Kami ju-

ga memperpanjang usulan penyesuaian UKT. Semula berakhir 30 Juni 2020, tapi kami perpanjang sampai 15 Juli karena masa pembayaran UKT mulai dari 20 Juni hingga 4 Agustus. Perwakilan mahasiswa memiliki akses yang sama dengan anggota tim verifikasi di fakultas dan juga membahas usulan mahasiswa," bebernya.

Tak hanya itu, di tengah pandemi virus Corona ini, UNY memperbolehkan mahasiswa untuk melakukan program KKN di tempat tinggal mereka sendiri. Dengan begitu, kemungkinan penolakan bisa diminimalisasi. "Jika masih ada penolakan, LPPM UNY akan berkoordinasi dengan Kemendes PDDT untuk mencari alternatif pemecahan," tukasnya.

Ditambahkan, UNY memutuskan bahwa program KKN yang paling sesuai adalah *Doing KKN while Staying at Home*. Fokus KKN UNY adalah keselamatan mahasiswa tanpa menunda kelulusan. Mahasiswa dapat membuat program dengan proyek dan mengimplementasikannya secara individual.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UNY, Drs Setyo Budi Takarina MPd mengatakan, adanya dialog ini berarti tidak ada lagi informasi dan kebijakan pimpinan UNY yang belum tersampaikan kepada mahasiswa. (R1)-f

HARI TERAKHIR SELEKSI PPDB SMA-SMK NEGERI DIY Ribuan Pemegang Token Belum Mendaftar

YOGYA (KR) - Sampai Selasa (30/6) siang kemarin, dari sekitar 38.000 calon peserta didik (calon siswa/Casis) yang telah mengambil token, sebanyak 34.7400 Casis telah mendaftar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di DIY. Sehingga masih ada sekitar 3.600 Casis yang sudah punya token belum mendaftar seleksi.

"Mereka mungkin sebagian masih menunggu di hari terakhir, Rabu (1/7). Tapi sebagian mungkin tidak berniat mendaftar lagi karena sudah diterima di sekolah yang lain atau mungkin juga nilai yang dimiliki, sudah kalah bersaing di sekolah yang diinginkan," ujar Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya SE MM MPd saat Live PPDB SMA

PPDB di sekolahnya.

Dijelaskan, di hari ketiga, Rabu (1/7), atau hari terakhir PPDB, calon siswa masih bisa mendaftar, tetapi tidak bisa melakukan perubahan data, misalnya pindah jalur atau pergeseran pilihan sekolah. Oleh karena itu, sebelum mendaftar dicermati betul. Sedangkan pendaftaran untuk seleksi sudah dibuka sejak, Senin (29/6), dan diberikan kesempatan mengubah pilihan Selasa (30/6) kemarin.

"Pendaftaran seleksi PPDB belum berakhir sehingga persaingan masih sangat dinamis. Pendaftaran terakhir ikut seleksi yakni hari ini Rabu (1/7) dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB. Setelah penutupan pendaftaran, hari berikutnya adalah proses seleksi (sistem) kemudian pengumuman nama-nama



KR-Istimewa

Didik Wardaya SE MM MPd

siswa yang diterima.

Menurut Didik, dari data PPDB SMA/SMK DIY 2020 hingga Selasa (30/6) pukul 12.00 WIB, jumlah calon siswa SMA yang namanya terpampang sebanyak 13.681 orang sedangkan nama calon siswa SMK yang terpampang sebanyak 16.498 orang, sehingga jumlah totalnya 30.179. Se-

dangkan jumlah siswa yang terlempar dari zona 1 ke zona 2 dan 3 karena kalah bersaing di nilai gabungan atau bahkan namanya sudah tidak terlihat lagi juga cukup banyak.

"Nampaknya siswa yang menunggu sampai hari terakhir untuk mendaftar juga masih banyak dan biasanya punya nilai tinggi. Ini bisa menggeser siswa yang sudah mendaftar di hari pertama dan kedua. Pergerakan casis masih akan terjadi di hari ketiga pendaftaran," katanya.

Sementara Elyas menyampaikan bahwa kuota 216 kursi di SMKN 1 Yogya sudah terpenuhi, dan tinggal proses geser-menggeser siswa, terutama bagi casis di pilihan ketiga yang kemungkinan besar akan tergeser. Menurut Elyas, proses PPDB di sekolahnya berjalan lancar. SMKN 1 Yogya memiliki tiga kompetensi keahlian yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, otomasi dan tata kelola perkantoran serta bisnis daring dan pemasaran. (Dev)-d

SAMPAI 31 JULI 2020

KA Lokal I Jakarta Belum Beroperasi

JAKARTA (KR) - Penyesuaian pola operasional perjalanan kereta api (KA) lokal yang belum dapat beroperasi untuk sementara di wilayah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, mengalami perpanjangan waktu hingga 31 Juli 2020 mendatang. Hal ini dilakukan mengingat masa darurat wabah Covid-19 belum berakhir, serta berbagai upaya langkah pencegahan penyebaran Covid-19 yang masih terus dilakukan.

"Sebelumnya penyesuaian pola operasional berupa pembatalan sementara perjalanan KA lokal di seluruh area Daop 1 Jakarta mulai diberlakukan secara bertahap sejak 1 April 2020," ujar Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa, Selasa (30/6).

Khusus di Daop 1 Jakarta, terdapat 31 perjalanan KA lokal yang dibatalkan, dengan rincian 6 KA Pangrango (relasi Bogor-Sukabumi PP), 12

KA Merak (Rangkasbitung-Merak PP), enam KA Walahar (Tanjung Priok-Purwakarta PP), empat KA Jatiluhur (Tanjung Priok-Cikampek PP), dan tiga KA Siliwangi (Sukabumi-Ciranjang).

Menurut Eva, perpanjangan pembatalan KA lokal yang ditetapkan hingga 31 Juli 2020 ini akan terus dievaluasi bersama dengan melihat perkembangan di lapangan. (Imd)-f

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Bayar Iuran JKN-KIS Tepat Waktu Sebelum Tanggal 10 Setiap Bulan

Pemerintah telah menyediakan Bantuan iuran untuk Peserta Mandiri (PBPU/BP) Kelas 3 sebesar Rp16.500,-/orang/bulan

DENGAN GOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG

Ketentuan iuran JKN-KIS per 1 Juli 2020 bagi peserta Mandiri (PBPU/BP) sesuai dengan Perpres 64 Tahun 2020 *)

- Kelas 3 • Rp 42.000/orang/bulan **)
- Kelas 2 • Rp 100.000/orang/bulan
- Kelas 1 • Rp 150.000/orang/bulan

*) Ketentuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 34 Ayat (1) huruf a, (2) dan (3)

***) Khusus peserta Kelas 3 Tahun 2020 hanya membayar iuran sebesar Rp25.500,- Pemerintah telah menyediakan bantuan iuran sebesar Rp16.500,-

Bayar > Aktif > Selamat

24 HOURS CARE CENTER JAM 1500 400